

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA PANTAI

BANTUL DISTRICT GOVERNMENT STRATEGY IN DEVELOPING COASTAL TOURISM

Oleh: Sinang Ikka Churniawan, Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Yogyakarta, sinangikkach@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan pariwisata pantai melalui peningkatan kualitas wisata dan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai dimulai dari adanya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah. Penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul dilakukan dengan kerjasama Pemerintah, masyarakat dan swasta. Penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai tersebut belum optimal akibat permasalahan pemerataan pembangunan di objek wisata. Dengan adanya pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul diharapkan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata Pantai

Abstract

This research aims to determine the implementation of Bantul District Government strategy in equitable development and beach tourism development through improving the tourism quality and the construction of facilities and infrastructure facilities. The research method used in these research was descriptive qualitative. The result show that the implementation of Bantul District Government strategy in developing beach tourism starting from the Master Plan of Regional Tourism Development. The implementation of beach tourism development strategy in Bantul Regency was done by cooperation of Government, society and private. The implementation of beach tourism development strategy was not optimal due to the problem of equitable development in the tourist attraction. With the development of beach tourism in Bantul Regency expected to optimize the original revenue and improve the public welfare.

Keywords: Strategy, Beach Tourism Development

PENDAHULUAN

Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya berada di sebelah selatan Kota Yogyakarta. Kabupaten Bantul dikenal salah satunya karena objek wisata yang dimiliki. Potensi objek wisata di kabupaten Bantul meliputi objek wisata alam, wisata budaya/sejarah, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. Potensi pariwisata tersebut memberikan peluang Kabupaten Bantul untuk menjadi tempat tujuan wisata.

Dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Bantul didasarkan pada Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata di Kabupaten Bantul.

Potensi pariwisata yang terdapat di Kabupaten Bantul salah satunya adalah pariwisata pantai. Kabupaten Bantul tercatat memiliki 15 pantai yang dikelola menjadi objek pariwisata pantai. Menurut data Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tahun 2017, pariwisata pantai yang ada di Kabupaten

Bantul antara lain Pantai Parangtritis, Pantai Parangkusumo, Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Patehan, Pantai Goa Cemara, Pantai Baru, Pantai Kuwaru, Pantai Pandansimo dan lain-lain.

Berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Pantai Parangtritis telah mendapat prioritas pembangunan sektor pariwisata, terbukti dengan dibangunnya infrastuktur yang memadai, seperti akses jalan yang mudah, sarana dan prasarana pariwisata seperti toilet, tempat ibadah, tempat berjualan, restoran, hotel, penginapan dan sebagainya. Prioritas pembangunan tersebut dilakukan agar dapat menampung wisatwan dan memberikan pelayanan yang memadai. Selain itu prioritas pembangunan Pantai Parangtritis juga dikarena kawasan Parangtritis merupakan kawasan pantai yang luas di Kabupaten Bantul dan kawasan Pantai Parangtritis memiliki jumlah pengunjung yang cukup banyak.

Pantai Pelangi adalah salah satu pariwisata pantai yang berada di Kabupaten Bantul. Pantai ini merupakan pariwisata pantai yang telah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, kondisi Pantai Pelangi saat ini telah terjadi

penurunan kualitas. Hal tersebut berdasarkan kondisi keindahan pantai yang telah mengalami kerusakan, kondisi lahan parkir yang terbatas serta kondisi kamar mandi umum yang kurang terawat. Selain itu kurangnya pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi alasan penurunan kualitas pariwisata di Pantai Pelangi.

Dari hasil penjelasan tersebut, pembangunan kawasan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul dapat dikatakan kurang merata. Prioritas pembangunan yang telah dilaksanakan di Pantai Parangtritis, sedangkan pantai-pantai yang lainnya belum dilakukan pembangunan yang setara dengan Pantai Parangtritis. Kurangnya prioritas pembangunan yang terjadi, mengakibatkan kurangnya penyebaran jumlah wisatawan.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul melakukan pembangunan pariwisata pantai dengan cara mengembangkan potensi yang ada dimasing-masing objek wisata. Pengembangan tersebut dilakukan karena potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul berbeda-beda, seperti Pantai Depok, Pantai Baru dan Pantai Kuwaru memiliki potensi wisata kuliner. Kemudian Pantai Parangkusumo memiliki potensi sejarah dan budaya, serta Pantai Parangtritis dan Pantai

Goa Cemara memiliki potensi keindahan alam.

Meskipun setiap objek wisata pantai Kabupaten Bantul memiliki potensi masing-masing, karena kurangnya fasilitas serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata memberikan pengaruh terhadap jumlah pengunjung dan tingkat keramaian dari objek wisata. Kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana di beberapa objek wisata pantai seperti Pantai Samas dan Pantai Pandansimo, tersebut berupa kemudahan akses seperti transportasi umum yang belum ada, tempat ibadah, penginapan, perawatan fasilitas umum yang kurang, serta kebersihan pantai yang kurang terpelihara.

Dalam pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta. Peran Pemerintah adalah sebagai aktor utama dalam proses pengembangan dikarenakan Pemerintah sebagai pembuat strategi dan implementor. Kemudian peran masyarakat adalah sebagai ujung tombak dalam proses pengelolaan, dimana masyarakat terlibat dan berada langsung di lokasi objek wisata yang dikelola. Selanjutnya peran swasta adalah sebagai aktor pendukung yang berasal dari luar pemerintahan. Peran swasta dalam

pengembangan pariwisata di Kabupaten Bantul masih sedikit. Hal ini dijelaskan pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul bahwa dalam pariwisata pantai, peran swasta yang ada sampai saat ini hanya berada pada bidang akomodasi paket-paket wisata.

Dalam proses penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai, maka teori yang digunakan untuk melihat keberhasilan penerapan adalah teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut Meter dan Horn ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi dan disposisi implementor. (Subarsono, 2011:99)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemerataan pembangunan dan pengembangan Pariwisata Pantai, melalui peningkatan kualitas setiap tempat wisata dan pembangunan fasilitas serta sarana prasarana. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai penerapan strategi

Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membangun dan mengembangkan pariwisata pantai dengan menggunakan pendekatan-pendekatan teori yang terkait dengan penelitian.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif karena permasalahan yang kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga penelitian disesuaikan dengan tujuan awal yakni mendapatkan data dengan cara menginterpretasikan kata-kata. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di instansi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul serta obyek pariwisata pantai yang berada di Kabupaten Bantul. Adapun penelitian

dilaksanakan pada April 2017 sampai April 2018.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2009:132), dengan demikian dapat dihasilkan data penelitian yang akurat.

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Bapak Karman yaitu Kepala Bagian Sarana, Obyek dan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
2. Bapak Ilyas Suprpto yaitu bagian Kasi Kesejahteraan, Kelurahan Parangtritis.
3. Bapak Bowo Nurcahyo yaitu bagian Kasi Pembangunan, Kelurahan Gadingsari.
4. Ibu Ami, yaitu pedagang salah satu tempat makan di Pantai Parangtritis.
5. Agung, yaitu salah satu pengunjung obyek wisata Pantai Goa Cemara.
6. Deta Aditya, yaitu salah satu pengunjung obyek wisata Pantai Pelangi

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument utama.

Sedangkan instrumen tambahan terdiri dari alat perekam suara, pedoman wawancara, lembar atau panduan pengamatan, serta kamera untuk mendokumentasikan bukti-bukti di lapangan.

Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara peneliti tentang strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai. Kemudian data sekunder dalam penelitian ini adalah data kunjungan wisata, data PAD pariwisata, buku panduan wisata yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul serta data-data lain yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata pantai.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu: Pertama, wawancara yang dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan data dalam penelitian. Narasumber yang dipilih merupakan *stakeholder* yang memiliki pengetahuan di bidang tersebut, mulai dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul sebagai informan kunci. Selanjutnya peneliti mencoba membandingkan relita dilapangan dengan

apa yang disampaikan narasumber pada saat wawancara.

Kedua, Observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan terhadap situasi dan aktivitas di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul kemudian observasi yang dilakukan selanjutnya adalah meliputi situasi dan kondisi obyek pariwisata, ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata, serta aktivitas masyarakat di tempat wisata.

Ketiga, Dokumentasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah mengabadikan hasil wawancara peneliti dengan narasumber, baik dalam bentuk catatan, gambar dan juga rekaman suara.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data berupa triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. (Sugiyono, 2011:274).

Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan data yang diperoleh merupakan data kualitatif. Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Tahapan dalam menganalisis data yang digunakan adalah

model interaktif, yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan daerah pantai sebagai objek pariwisata merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Bantul terutama dalam hal strategi pengembangan pariwisata pantai. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2015-2025. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor pengembangan pariwisata pantai yang dalam hal ini diamanahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.

Penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015. Dan dalam penelitian ini penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai akan dianalisis menggunakan indikator-indikator dari Van Meter dan Van Horn sebagai berikut (Subarsono, 2011:99):

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dalam penerapannya, strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai memiliki sasaran yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata daerah Tahun 2015-2025. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sasaran dalam pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Bantul meliputi:

- a. Terciptanya berbagai inovasi jenis daya tarik wisata.
- b. Tersedianya fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal
- c. Meningkatnya paket wisata yang variatif, dikelola secara sinergis dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan/atau oleh pelaku wisata.
- d. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara.
- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan Daerah.
- f. Terwujudnya pariwisata bernuansa sejarah, budaya yang kreatif dan inovatif sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.
- g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik wisata yang aman dan nyaman yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.
- h. Meningkatnya produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto dan pendapatan masyarakat dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup.
- i. Terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra daerah sebagai destinasi pariwisata.
- j. Terwujudnya industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antar usaha pariwisata, perluasan lapangan kerja dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.
- k. Terwujudnya lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, kawasan pariwisata dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

- l. Terwujudnya pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan daerah.
- m. Terciptanya sumber daya manusia pariwisata yang handal dan profesional
- n. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya sapta pesona.

Dari sasaran yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwa penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai ditujukan bagi seluruh birokrasi yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, khususnya Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kemudian perlu adanya kerjasama dengan Pemerintah Desa, masyarakat serta dari pihak swasta.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam alam mencapai sasaran pembangunan keparwisataan Kabupaten Bantul, maka tolak ukur yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan adanya hasil Indikator Kinerja Utama yang di susun oleh Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul. di dalam Indikator Kinerja Utama terdapat 2 indikator yaitu terkait dengan hasil dari jumlah kunjungan wisata dan hasil PAD dari pariwisata.

2. Sumber daya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata adanya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bantul mempunyai peran dalam proses penerapan strategi. Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dapat dikatakan cukup memadai dengan adanya 149 pegawai yang bekerja dalam bidang keparwisataan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata bahwa meskipun SDM yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul telah mencukupi, namun masih ada permasalahan terkait SDM. Dinas Parwisiata Kabupaten Bantul pada Bidang Destinasi Pariwisata yang memiliki tugas dan fungsi berupa meningkatkan dan mengelola objek wisata masih kekurangan SDM yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan teknik.

Kemudian sumber daya non manusia yang ada di Dinas Pariwisata

Kabupaten Bantul adalah aset-aset objek wisata pantai itu sendiri. Kondisi aset wisata pantai yang ada di Kabupaten Bantul telah didata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Data tersebut akan digunakan sebagai daftar aset yang dimiliki dan akan dikembangkan agar menjadi objek wisata pantai yang berkualitas.

Selanjutnya, sumber daya non manusia yang lainnya adalah pendanaan. Ketersediaan sumber dana merupakan faktor yang penting dalam setiap penerapan strategi. Ketersediaan dana akan mempengaruhi penyediaan tenaga pelaksana, administrasi penanganan penerapan strategi dan pengendalian untuk menjamin diperolehnya dukungan dan kepatuhan.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktifitas

Koordinasi tersebut dilakukan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan pihak SKPD yang terkait dengan penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul. koordinasi dilakukan pada proses penyusunan perencanaan dan juga pada evaluasi terkait penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. Hal

tersebut dilakukan untuk mendapatkan kesamaan pemahaman terkait para implementor dan mengetahui seberapa jauh keberhasilan penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan koordinasi dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin, rapat dan undangan seminar. Selain itu koordinasi juga dilaksanakan dengan menggunakan telepon, surat, *email* dan *sosial media*.

4. Karakteristik agen pelaksana

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya memiliki pola hubungan yang bersifat garis komando, garis koordinasi dan garis monitoring. Pola hubungan antara pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul adalah dengan garis komando yang berdasarkan pada struktur organisasi. Garis komando tersebut seperti komando yang berasal dari Kepala Dinas Pariwisata ke Kepala Bidang, dari Kepala Dinas Pariwisata ke Sekretaris, dari Sekretaris ke Kepala Seksi ataupun dari Sekretaris ke Kepala Subag. Kemudian dalam pola hubungan garis koordinasi seperti, koordinasi yang

dilakukan disetiap masing-masing bidang dalam menjalankan kegiatan. Salah satunya adalah Bidang Pemasaran melibatkan Bidang Destinasi ataupun Bidang Pemasaran melibatkan Bidang Kapasitas. Hal tersebut merupakan kerjasama antara bidang dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul yang dilakukan dengan koordinasi antar bidang. Selanjutnya pola hubungan garis monitoring di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilaksanakan seperti monitoring program keuangan dan aset untuk Sekretariat dan garis monitoring juga dilaksanakan disemua bidang.

Kemudian dalam pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul, selain Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, agen pelaksana strategi adalah masyarakat. Peran masyarakat dalam penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul adalah sebagai pendukung dalam pengembangan pariwisata. Masyarakat akan selalu terlibat dalam pelaksanaan strategi pengembangan dan masyarakat merupakan pelaku wisata yang berada di objek wisata.

Sampai saat ini respon masyarakat terhadap penerapan strategi

pengembangan pariwisata pantai dapat diterima oleh masyarakat adalah baik. Hal tersebut ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat yang baik pada saat diadakan acara, ataupun lomba-lomba dan masyarakat juga aktif pada himbauan ataupun instruksi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata bahwa peran swasta dalam penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai saat ini masih berupa akomodasi tujuan wisata. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul masih kecil. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tetap membuka diri dengan adanya investasi atau kerja sama dengan swasta dalam bidang pariwisata pantai. Peran swasta dalam pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang baik jika dilakukan dengan optimal.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Terkait dengan penerapan strategi Pemerintah kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai, salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah adanya Peraturan

Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah tahun 2015-2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mendukung terhadap adanya pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bantul. Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah menjadikan pariwisata menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian. Kemudian dengan adanya UU Keistimewaan DIY telah mendukung dengan adanya peraturan terkait tanah Sultan. Dukungan tersebut mempermudah Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam mengurus terkait tata ruang objek wisata. Hal tersebut dikarenakan tanah Sultan *ground* yang merupakan tanah milik Sultan sebagian adalah lokasi objek wisata.

Kondisi lain yang mempengaruhi penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai adalah kondisi sosial di masyarakat yang berada di objek wisata. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, kondisi sosial di masyarakat terkait pengembangan pariwisata pantai

merupakan kemauan masyarakat. Masyarakat secara langsung melakukan inisiatif pengembangan pariwisata pantai. Pengembangan tersebut kemudian didukung oleh Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul agar pengembangannya dapat memberikan dampak positif.

Selanjutnya dukungan secara pendanaan juga didapatkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menerapkan strategi pengembangan pariwisata pantai. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata, dukungan tersebut berasal dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Kemudian dukungan lain berupa pelaksanaan program-program kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan di Kabupaten Bantul. Pemerintah Propinsi juga mendukung Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana objek wisata dan peningkatan kualitas SDM

6. Disposisi implementor

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pariwisata sampai saat ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum melakukan perubahan terkait Peraturan Daerah terkait

pengembangan pariwisata. Evaluasi akan dilakukan setiap lima tahun untuk melihat kesesuaian Peraturan Daerah tersebut dalam mengembangkan pariwisata pantai. Evaluasi pertama akan dilaksanakan pada tahun 2020. Peninjauan Peraturan daerah tersebut terkait dengan kesesuaian isi strategi pengembangan yang di sinergikan dengan adanya masukan aspirasi dari masyarakat dalam strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul.

Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menerapkan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai dapat menjalankan adanya strategi yang berasal dari Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul juga menampung adanya masukan dari masyarakat terkait pengembangan pariwisata pantai. Selain itu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dalam menerapkan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai mempunyai harapan dengan adanya pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan bersinergi antara semua

unsur-unsur SKPD – SKPD ditingkat kementerian maupun propinsi.

Dengan adanya pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian. Adanya objek wisata secara otomatis akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan penawaran jasa maupun barang dengan wisatawan, sehingga hal tersebut dapat dijadikan lahan pasar bagi masyarakat.

Objek pariwisata pantai di Kabupaten Bantul yang telah dikembangkan oleh Pemerintah memberikan hasil berupa retribusi wisatawan. Hasil retribusi tersebut secara langsung masuk ke Pemerintah Daerah dan menjadi salah satu pemasukan PAD. Target Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk kunjungan wisatawan tahun 2017 telah terpenuhi, sehingga secara otomatis target pendapatan PAD juga akan terpenuhi.

Pemerataan pembangunan yang dilakukan diseluruh pariwisata pantai dapat memberikan pemasukan PAD kepada Pemerintah Daerah, terlebih jika semua pariwisata dikembangkan dengan optimal, maka akan meningkatkan jumlah pendapatan PAD. Langkah korektif yang perlu disadari oleh semua *stakeholder* yang terlibat adalah dengan diadakannya

pengembangan pariwisata pantai maka akan mendatangkan daya manfaat yang besar. Menyadari daya manfaat yang bisa didapatkan dalam aktivitas pengembangan pariwisata pantai, maka sudah selaknyaknya pengembangan pariwisata pantai dilaksanakan secara optimal.

Penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan melibatkan masyarakat dan swasta. Namun dalam penerapan strategi tersebut Dinas Pariwisata belum menjalankan secara optimal karena masih ada faktor penghambat dalam pengembangan pariwisata pantai. Faktor penghambat tersebut berupa pemerataan pembangunan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan penerapan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025. Dalam peraturan ini telah menetapkan sasaran dan tujuan dari kebijakan pengembangan pariwisata pantai dan juga arah dari kebijakan tersebut

2. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul merupakan aktor utama dalam pelaksanaan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengembangkan pariwisata pantai dengan melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait, masyarakat dan pihak swasta.
3. Berdasarkan dari kondisi pariwisata pantai Kabupaten Bantul, penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai Kabupaten Bantul yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul belum optimal dan merata. Pengelolaan dan pembangunan objek wisata pantai masih terpusat di pantai Parangtritis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran terkait strategi pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Penerapan strategi pengembangan pariwisata pantai yang ideal membutuhkan peran kuat dari

- Pemerintah, Masyarakat dan Swasta untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Perlu adanya peningkatan investasi swasta dalam membantu pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Bantul.
 3. Perlu adanya peningkatan SDM di internal Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan SDM masyarakat yang bergerak di bidang kepariwisataan.
 4. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul perlu melakukan pemerataan pembangunan disetiap objek wisata pantai yang ada.
 5. Perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk mengevaluasi strategi yang digunakan ataupun mengevaluasi dalam penerapan strategi. Hal tersebut diperlukan sebagai upaya untuk meminimalisasi masalah pemerataan pembangunan dan pengembangan.

Diharapkan kedepannya Pemerintah dapat mengoptimalkan pengembangan pariwisata pantai keseluruhan objek wisata pantai yang ada di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono, (2009). *Otonomi daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dinas Pariwisata, (2017). *Data Pariwisata Pantai Kabupaten Bantul*, diakses tanggal 12 Maret 2017 dari <http://disbudpar.bantulkab.go.id/>
- Moleong, J. Lexy, (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Baerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281 Telp: 526162 Psw: 247, 248, 249

Formulir Penulisan dan Pengunggahan Artikel E-Journal Mahasiswa
Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Nama Mahasiswa	Sinang Ikka Churniawan
NIM	11417144031
Judul Tugas Akhir Skripsi	Strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Mengembangkan Pariwisata Pantai
Nama Dosen Pembimbing	Drs. Argo Pambudi, M.Si
Nama Dosen Reviewer	Francisca Winarni, M.Si
Tanggal Ujian Skripsi	31 Mei 2018

Yogyakarta, 18 Juli 2018

Menyetujui.

Dosen Reviewer


(Francisca Winarni, M.Si)
NIP. 19590119 198702 2 002

Dosen Pembimbing


(Drs. Argo Pambudi, M.Si)
NIP. 19620224 199303 1 001

Pengelola E-Journal
Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Panduan Yuanjaya, MPA
NIP. 115109007136 14